

## TAJUK RENCANA

### Mitigasi Bencana di Pekalongan

BENCANA tanah longsor yang melanda Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan mengakibatkan korban jiwa, 18 orang meninggal dan delapan lainnya (data sementara) masih hilang. Petugas dari BPBD, TNI/Polri dan relawan masih dikerahkan untuk mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun longsor. Mengingat kondisi di wilayah tersebut yang masih berbahaya akibat hujan yang belum reda sepenuhnya, petugas diminta untuk mengutamakan keselamatan diri (KR 22/1).

Kita berduka atas musibah yang terjadi di Pekalongan yang merenggut korban jiwa. Kita masih tetap menyebut bencana tersebut sebagai musibah, karena terjadi tanpa diduga, datang secara tiba-tiba dan menimbulkan dampak yang luar biasa hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tak ada yang mengira hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang sejak Senin (20/1) malam hingga Selasa (21/1) pagi bakal berdampak sangat merusak, menghancurkan dua jembatan utama yang menghubungkan desa-desa di Pekalongan.

Seolah semua menyalahkan alam yang tidak bersahabat. Padahal, sebelumnya BMKG telah mengingatkan ancaman bahaya bencana hidrometeorologi, antara lain banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi, termasuk di wilayah Jawa Tengah. Namun, agaknya hal itu kurang diantisipasi secara sigap, sehingga bencana yang tidak kita harapkan itu datang.

Selama ini yang sering disebutkan sebagai penyebab longsor adalah curah hujan yang tinggi, termasuk yang terjadi di Pekalongan. Padahal itu bukanlah faktor tunggal, melainkan ada faktor lain seperti diingatkan BMKG yakni pengaruh Monsun Asia, yang menyebabkan meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut hingga berkontribusi terjadinya longsor.

Kita memang sering belajar setelah ada kejadian atau peristiwa, termasuk longsor di Pekalongan yang mengakibatkan korban jiwa.

Sebenarnya, peristiwa serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Berkenaan bencana longsor di Pekalongan kiranya kita perlu mengevaluasi secara menyeluruh menyangkut faktor-faktor penyebabnya agar peristiwa serupa tidak terulang di wilayah lain.

Misalnya, sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana di daerah yang masuk kategori rawan. Pemkab Pekalongan pasti telah memiliki peta rawan bencana di wilayahnya. Atau, sejauh mana Pemkab setempat telah melakukan mitigasi bencana dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah yang harus dilakukan menghadapi potensi terjadinya bencana. Apalagi, kalau kita melihat kondisi geologis dan topografi wilayah yang berbukit di kawasan Petungkriyono Pekalongan yang potensial menimbulkan kerawanan terjadinya longsor.

Belum lagi bila terjadi penggundulan hutan, sehingga mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air akan mempermudah terjadinya longsor. Faktor inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah setempat guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Jadi, hendaknya jangan mudah kita menyalahkan alam yang tidak bersahabat. Sebaliknya, kita justru bersahabat dengan alam, caranya antara lain dengan mengenali karakteristiknya sehingga paham cara merawatnya.

Kalau mau dirunut, kejadian bencana seperti banjir dan longsor selalu ada penyebabnya, antara lain akibat ulah manusia. Menebangi pohon secara serampangan hingga mengakibatkan hutan gundul umumnya menjadi penyebab bencana longsor. Kita berharap bencana longsor di Pekalongan tidak terulang di wilayah lain. Bersahabat dengan alam tentu tidak dengan cara merusaknya, melainkan merawatnya dengan penuh tanggung jawab, agar alam tidak 'murka'. □-d

## Kemiskinan dan Ketimpangan DIY Membaik

**SALAH** satu variabel indikator ekonomi yang mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah adalah besarnya persentase penduduk yang terkategori miskin dalam wilayah tersebut. Definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang direpresentasikan oleh besarnya nilai garis kemiskinan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

### Kemiskinan Membaik

Periode Maret - September 2024, kesejahteraan penduduk DIY menunjukkan ke arah yang lebih baik. Kondisi ini dijelaskan oleh rilis data BPS tentang kemiskinan yang menyatakan terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 10,83 persen (445,55 ribu orang) pada Maret 2024 menjadi sebesar 10,40 persen (430,47 ribu orang) pada September 2024. Ini menjadi kabar yang menyejukkan karena tren penurunan angka kemiskinan secara kuantitas terus berlanjut sejak September 2022 sampai September 2024.

Di sisi lain, kualitas kemiskinan periode Maret - September 2024 juga mengalami perbaikan. Hal ini dijelaskan oleh menurunnya 2 (dua) indikator, yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Seperti diketahui bahwa indeks kedalaman kemiskinan mengukur jarak rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengukur jarak pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap pengeluaran per kapita penduduk miskin teratas. Semakin kecil nilai kedua indikator ini maka semakin baik kualitas kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan DIY pada Maret 2024 sebesar 1,867 kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada September 2024 menjadi sebesar 1,563. Artinya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di DIY semakin mendekati garis kemiskinan yang menggambarkan bahwa kesejahteraan

### Soman Wisnu Darma

raan penduduk miskin secara umum mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Sedang untuk indeks keparahan kemiskinannya, pada Maret 2024 sebesar 0,450 dan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada September 2024 menjadi 0,338. Penurunan indeks keparahan kemiskinan ini menunjukkan bahwa jarak pengeluaran per kapita penduduk miskin antara yang terendah dan tertinggi semakin mendekati atau dengan kata lain ketim-

kelompok menengah ke bawah terutama kelompok penduduk miskin.

Data distribusi pengeluaran penduduk DIY mengkonfirmasi adanya peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat kelompok bawah tersebut. Pada kelompok penduduk 40 persen terbawah dalam periode Maret - September 2024 terjadi kenaikan kontribusi pengeluaran. Pada Maret 2024, kontribusinya sebesar 16,05 persen mengalami kenaikan pada September 2024 menjadi 16,48 persen. Di sisi lain, dalam periode yang sama terjadi penurunan kontribusi baik pada kelompok penduduk 40 persen menengah maupun kelompok penduduk 20 persen teratas. Pada Maret 2024, kontribusi kedua kelompok tersebut masing-masing sebesar 32,62 persen dan 51,33 persen kemudian mengalami penurunan pada September 2024 menjadi 32,44 persen dan 51,08 persen. Artinya kesejahteraan kelompok penduduk bawah terutama penduduk miskin benar-benar mengalami perbaikan dalam periode Maret - September 2024.

Perbaikan kuantitas dan kualitas angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan angka ketimpangan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Konsistensi dalam program baik pemberdayaan maupun bantuan sosial diikuti dengan program imakanan bergizi gratis danisangat membantu penduduk miskin meningkatkan kesejahteraannya dan harapannya pada tahun 2025 bisa tercapai angka kemiskinan satu digit. □-d

\*) **Soman Wisnu Darma SSi MT,** Statistisi BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



KR-JOKO SANTOSO

pangan pengeluaran antarpenduduk miskin di DIY semakin membaik.

### Ketimpangan Kian Membaik

Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY secara umum juga mengalami perbaikan. Ini dikonfirmasi oleh data rasio gini yang mengalami penurunan pada periode Maret - September 2024. Pada Maret 2024 rasio gini DIY sebesar 0,435 kemudian mengalami penurunan menjadi 0,428 pada September 2024. Penurunan rasio gini tersebut menjelaskan bahwa jarak pengeluaran per kapita penduduk termiskin dan penduduk terkaya semakin mendekat. Penurunan rasio gini yang diikuti penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran per kapita pada penduduk

## 'Retret' Kepala Daerah, Pentingkah?

**PRESIDEN** Prabowo berencana menyelenggarakan orientasi kepemimpinan bagi Kepala Daerah baru paska pelantikan. Orientasi dalam bentuk *retret* akan dijadikan media untuk memperkuat kesepahaman (*mutual understanding*) tentang program program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

*Retret* akan dijadikan sebagai piranti membangun komunikasi yang efektif dan sinergitas vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan program Asta Cita. Juga dalam kerangka membangun solidaritas pusat dan daerah yang berbasis kesatuan program kerja.

Namun pertanyaannya, apakah *retret* kepala daerah (Gubernur dan walikota/bupati) akan efektif dalam mengkrystalisasikan kebersamaan dalam merealisasikan program unggulan pemerintah pusat, Minimal sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pemerintah pusat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen penguangan visi misi kepala daerah terpilih.

Belajar dari *retret* para menteri dan wakil menteri yang dilaksanakan awal pemerintahan Prabowo-Gibran di Akmil Magelang, hasilnya tidak sesuai harapan. Sebab usai *retret* banyak kontroversi dari pernyataan dan sikap beberapa menteri dan wakil menteri atau utusan khusus yang memicu sinisme dan kritisisme publik. Yang justru menggambarkan *retret* tidak memberikan *output* terkait pemahaman arah kebijakan presiden.

Menteri Desa PDPT Yandri Susanto paska *retret* justru "blunder" dengan menggunakan legitimasi kementerian untuk urusan pribadi yang sesungguhnya juga bisa dipandang sebagai bentuk konsolidasi politik elektoral pilkada. Menteri Hukum Natalius Piagai belum bekerja sudah an-cang-an-cang meminta anggaran Rp 20 triliun dengan kalkulasi program kerja yang imajinatif. Utusan Khusus Presiden dalam bidang toleransi keagamaan Miftah Maulana melakukan "penistaan" terhadap profil pekerjaan kaum marginal, yakni penjual es teh. Menteri Komdigi memilih staf khusus yang dalam status bermasalah secara hukum.

Demikian beberapa menteri juga menuai kritik publik atas sikap dan tindakannya. Menteri perumahan Rakyat, Maruarar Sirait bermasalah saat enggan memasang gambar wapres di kan-

### Trisno Yulianto

tornya dengan dalih satu komando pada perintah Presiden. Hasil *retret* di Akmil tidak menunjukkan realitas bahwa kabinet persatuan tidak memaham visi misi presiden Prabowo.

*Retret* sebenarnya boleh dipahami sebagai bentuk kegiatan membangun kepercayaan kolektif (*collective trust*), sarana menjelaskan arah program dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden Prabowo, dan menjadi instrumen meletakkan beban target kerja yang terukur dan ilmiah. *Retret* bukan sekadar penyampaian pengetahuan tentang kepemimpinan, program pembangunan, pengetahuan tentang ekonomi-iptek-politik global dan sebagainya. *Retret* adalah upaya menciptakan kepercayaan yang berakar antara pemimpin dengan para pembantunya.

Lantas bagaimana tentang signifikan *retret* kepala daerah? *Retret* kepala daerah diletakkan dalam kerangka 3 hal penting. Pertama, sebagai ajang konsolidasi politik antara pemerintah pusat dan daerah agar dalam satu pemahaman gerak pelaksanaan program pembangunan dan program prioritas nasional. Secara realitas politik banyak kepala daerah terpilih yang bukan diusung koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024 sehingga membutuhkan komunikasi yang egalitarian dan menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian pemerintahan dalam bingkai NKRI.

Kedua, *retret* sebagai alat politik bagi pemerintah pusat (presiden) untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program unggulan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program yang masuk dalam visi Asta Cita. Agar ada satu kesatuan kebijakan dan tindakan bersama.

Ketiga, *retret* wujud apresiasi awal pemerintah pusat atas peluang peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan yang sejalan dengan program strategis nasional. Pemerintah pusat bukan asal menegaskan hegemoni posisi namun merangkul peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya. Skema program yang masuk dalam kategori urusan wajib dan urusan pilihan yang dijalankan pemerintah daerah tetap dalam bingkai program yang mendukung Asta Cita.

Keempat, *retret* akan fungsional jika pemerintah pusat (presiden) memberi penegasan kebijakan anti korupsi kepada para kepala daerah terpilih dan sekaligus efisiensi pengelolaan APBD yang komponen utamanya masih bergantung pada transfer fiskal pusat, baik Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bagi hasil pajak dan Migas.

*Retret* kepala daerah bersama presiden dan jajaran menteri terkait penting untuk menyamakan persepsi dalam hal arah program strategis, program unggulan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persamaan persepsi penting agar mengeliminasi lahirnya ketidakpercayaan kolektif pemerintah daerah yang berujung pada disobediensi pemerintah daerah.

Keberhasilan *retret* nantinya akan teruji ketika pemerintah daerah (kepala daerah) bersungguh-sungguh dalam mendukung pelaksanaan program nasional dan dalam loyalitas tinggi terhadap kepemimpinan pusat. *Retret* akan menunjukkan hasil positif jika nantinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aktifitas program kerja untuk masyarakat. □-d

\*) **Trisno Yulianto, Penulis** Koordinator Kajian Demokrasi Deliberasi

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriani Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE

**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin**

**Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampioto MPd. **Wakil Pemimpin**

**Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugianto, MM, CHE. **Redaktur**

**Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo

Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H

Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K

Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti

Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor

Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko

Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274)

555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan

Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm,

Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom

(min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1

klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang

Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan

Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm

x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan

tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis,

Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573,

Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:**

naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021)

8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan: H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini

Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Per-

wakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem,

Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD,

Wakil: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272)

322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala

Perwakilan: Musliikhah. Wakil: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.

Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Pojok KR

Longsor di Pekalongan mengakibatkan belasan orang meninggal.

- Ikut berduka, cari hikmahnya. \*\*\*

Pembuangan sampah sembarang di Bantul marak lagi.

-- Padahal lahannya lebih luas dibanding kota. \*\*\*

ASN Pemda DIY diminta tingkatkan etos kerja.

-- Meski gajinya tetap sama.

Berabe